



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UMKM

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda

lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menekankan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus didukung agar dapat segera naik kelas. UMKM diharapkan ke depannya dapat menjadi bagian dari rantai pasok global.

UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di tanah air. UMKM sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97%.

Besarnya kontribusi UMKM kepada negara, menjadi perhatian pemerintah untuk terus mendukung UMKM agar berkontribusi lebih terhadap perekonomian. Seperti diketahui bersama, selama pandemi berlangsung, banyak UMKM yang menutup usahanya karena merugi. Survei Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan sekitar 69,02%, UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Guna mendukung UMKM, Pemerintah mengharapkan adanya kolaborasi nyata dalam penerapan digitalisasi di pasar rakyat dan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kerja gotong royong. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi bisnisnya agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, mampu beradaptasi dengan kondisi pasar, kemudahan mendapat konsumen, menghemat biaya promosi, dsb.

Pemerintah akan memberikan kemudahan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan usaha mikro dari pemerintah dan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan yang diberikan Pemerintah untuk UMKM, di antaranya:

1. Pengaturan UMKM dalam UU tentang Cipta Kerja. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing;
2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan salah satu program yang dicetuskan Pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia dampak Covid-19. Realisasi anggaran PEN 2021 pada akhir tahun mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4% dari pagu Rp744,77 triliun;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR untuk memajukan UMKM disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun.

Besarnya dukungan Pemerintah terhadap UMKM menimbulkan tantangan tersendiri dari sisi pengawasan. Pengawasan UMKM selama ini masih minim, dengan tidak adanya data UMKM yang terintegrasi, menyulitkan Pemerintah pusat mengetahui UMKM yang telah dan tepat mendapatkan bantuan. Dukungan Pemerintah dari sisi pembiayaan tersebut harus tepat sasaran dan tepat penggunaan.

Atensi DPR

Banyaknya dukungan Pemerintah terhadap UMKM menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan evaluasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus memiliki *big data* UMKM di seluruh Indonesia agar dukungan Pemerintah dapat tepat sasaran. Bantuan dana dari Pemerintah harus dievaluasi secara berkala oleh Kementerian terkait, agar dapat terdeteksi UMKM mana yang berhasil naik kelas dan UMKM mana yang masih memerlukan bantuan Pemerintah. DPR RI melalui Komisi VI DPR RI perlu mengawasi dan mengevaluasi berbagai program bantuan untuk UMKM. Diharapkan dengan adanya peningkatan pengawasan maka pemberian bantuan bagi UMKM tepat sasaran dan tepat guna sehingga UMKM dapat memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian Indonesia

Sumber

antara.com, 16 Agustus 2022;

kompas.com, 16 Agustus 2022;

Pidato Presiden Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, 16 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022